



PERS RILIS: Kepala BPK Perwakilan Kalteng Ade Iwan Ruswana (dua dari kiri) bersama Sekda Kalteng Fahrizal Fitri (kiri) saat menyampaikan rilis penyerahan LHP kinerja dan LHP dengan tujuan tertentu kepatuhan atas penanganan pandemi Covid-19 di Kantor BPK Kalteng, Jumat (18/12).

Kinerja Penanganan Pandemi Cukup Efektif

Berdasarkan LHP BPK Kepatuhan Aturan Dinilai Sesuai dengan Pengecualian

PALANGKA RAYA-Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pusat maupun daerah sedang fokus terhadap pemeriksaan penanganan pandemi Covid-19, termasuk di wilayah Kalteng. Empat daerah menjadi sampel pemeriksaan, baik terkait laporan hasil pemeriksaan (LHP) kinerja maupun LHP dengan tujuan tertentu kepatuhan atas penanganan pandemi Covid-19.

Jumat (18/12), Kepala BPK Perwakilan Kalteng Ade Iwan Ruswana menyerahkan LHP kinerja atas penanganan pandemi Covid-19 bidang kesehatan kepada Pemprov Kalteng, Pemko Palangka Raya, Kabupaten Barito Timur (Bartim), dan Kabupaten Gunung Mas (Gumas). Selain itu, LHP dengan tujuan tertentu kepatuhan atas penanganan pandemi Covid-19 diberikan kepada Pemprov Kalteng dan Kabupaten Murung Raya (Mura).

► **Baca: Kinerja ... Hlm 7**

Item yang Mendapat Perhatian dalam LHP

Beberapa pengadaan barang dan jasa tidak sesuai ketentuan sehingga terjadi **kelebihan pembayaran sebesar Rp636 juta lebih dan pajak belum disetor senilai Rp256 juta lebih.**

Beberapa pembayaran belanja insentif tenaga kesehatan tidak sesuai ketentuan sehingga terjadi **pemborosan sebesar Rp495 juta dan kelebihan pembayaran sebesar Rp103 juta lebih.**

Pengelolaan data DTKS dan non-DTKS belum optimal dan kurang dapat dijamin validitasnya.

Refocusing kegiatan dan realokasi APBD dalam penanganan pandemi Covid-19 **belum sepenuhnya sesuai** dengan ketentuan.

Penatausahaan dan pengelolaan sumbangan pihak ketiga dalam penanganan pandemi Covid-19 **tidak sesuai ketentuan.**

Penetapan kebijakan perencanaan program dan kegiatan penanganan dampak ekonomi terkait Covid-19 **tidak optimal.**



SUMBER: BPK PERWAKILAN KALITING

■ KINERJA ...

(sambungan dari hlm 1)

"Pemeriksaan kinerja ini bertujuan untuk menilai efektivitas penanganan pandemi Covid-19 bidang kesehatan dengan sasaran tracking, testing, dan treatment serta edukasi sosialisasi," katanya saat menyampaikan rilis di Kantor BPK Perwakilan Kalteng.

Diungkapkannya, pemeriksaan dengan tujuan tertentu dengan sampel Pemprov Kalteng dan Kabupaten Mura ditujukan untuk menilai kepatuhan penda terhadap peraturan perundang-undangan dalam menangani pandemi Covid-19. Pemeriksaannya pada aspek refocusing dan realokasi anggaran penanganan

bidang sosial, dan penanganan bidang ekonomi.

"Dapat disimpulkan bahwa kinerja atas penanganan pandemi Covid-19 bidang kesehatan tahun anggaran (TA) 2020 di Pemprov Kalteng, Pemko Palangka Raya, Gumus, dan Bartim cukup efektif, sedangkan untuk kepatuhan aturan dinilai sesuai dengan pengecualian," ungkapnya.

Lebih lanjut dijelaskannya, pemeriksaan penanganan pandemi Covid-19 ini dilakukan hanya pada empat daerah, lantaran adanya pengurangan anggaran di BPK. Meski demikian, terhadap daerah lain yang tidak diperiksa tetap dilakukan pengumpulan data, khususnya data refocusing dan realokasi anggaran.

"Pemda memang sudah

mencapai beberapa keberhasilan dalam penanganan pandemi Covid-19, tetapi masih ada beberapa permasalahan signifikan yang perlu mendapat perhatian," bebernya.

Salah satu perbaikan adalah pada bidang testing. Pemda dinilai belum memiliki rencana operasi (renops) atau dokumen perencanaan lainnya untuk memastikan pengambilan dan pengiriman spesimen laboratorium kurang dari 1x24 jam. Memastikan laboratorium jejaring mampu mengonfirmasi hasil pengujian spesimen kurang dari 3x24 jam dan meminimalkan kerusakan spesimen.

"Sebagian entitas belum memiliki laboratorium yang memenuhi standar BSL-2, pengumpulan data spesimen

belum tertib, evaluasi dan koordinasi belum dilakukan terhadap kerusakan spesimen, dan kurang tertibnya penutupan data spesimen di kabupaten/kota," ucapnya.

Dalam upaya tracking, pihaknya menyebut pemda belum memiliki rencana operasi untuk penemuan kasus secara aktif dan secara pasif belum optimal, karena kurang dibarengi tindakan lanjut yang memadai.

"Termasuk pencatatannya, sehingga masih terjadi perbedaan antara data sistem online laporan harian Covid-19 dengan PHEOC. Pemda juga memiliki keterbatasan SDM, baik jumlah dan kompetensi dalam melakukan upaya

penemuan kasus secara aktif dan pasif," bebernya.

Pada upaya treatment, lanjut dia, pemda juga belum memiliki renops terkait strategi manajemen klinis untuk pelayanan kesehatan secara komprehensif di fasilitas pelayanan kesehatan. Penunjukan dan penetapan rumah sakit rujukan Covid-19 sepenuhnya perlu mempertimbangkan kesiapan RS.

"Tenaga kesehatan juga belum mencukupi untuk melaksanakan manajemen klinis. Pemberian insentif serta santunan kematian pada tenaga kesehatan belum sepenuhnya sesuai ketentuan. Termasuk monitoring dan evaluasi pelaksanaan manajemen klinis belum dilaksanakan secara komprehensif," ujar Ade.

Terhadap upaya edukasi, pihaknya menyebut masih ada salah satu entitas belum memiliki perencanaan strategis terkait komunikasi informasi dan edukasi penanggulangan Covid-19 yang komprehensif. Belum tersedia perencanaan strategis untuk pemantauan evaluasi dan koordinasi atas pelaksanaan regulasi yang mengatur protokol kesehatan di tempat umum yang dilakukan kabupaten/kota.

"Penyampaian pesan kunci kesehatan pun belum sepenuhnya mampu mengubah perilaku masyarakat. Selain itu, upaya sosialisasi ketentuan pidana bagi individu terhadap pelanggaran juga belum sepenuhnya dilakukan dengan optimal," katanya.

Ditambahkannya, pemda

juga belum memiliki regulasi yang mengatur keharusan tempat umum melengkapi tanda-tanda protes dan regulasi yang mengatur sanksi bagi pelanggar. Untuk itu, hasil pemeriksaan BPK menyimpulkan bahwa kepatuhan atas penanganan pandemi Covid-19 di Pemprov Kalteng dan Mura sesuai dengan pengecualian.

"Kesimpulan itu didasarkan karena masih adanya kelemahan-kelemahan yang ditemukan pada aspek pengendalian intern, ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, maupun permasalahan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan," tambahnya. (abw/ce/ala)